

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum, sebagai negara hukum, maka negara harus menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia hal ini dikarenakan hukum dan hak asasi manusia saling berkaitan satu sama lain. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum. Sebagai negara hukum upaya yang dilakukan oleh negara atau pemerintah tidak apat dilepaskan dari penegakan hukum yakni kepolisian, kepolisian dalam menjalankan tugasnya tunduk dan patuh pada tugas dan wewenang, salah satunya sebagai penyidik, dalam rangka melakukan penyidikan kepolisian harus harus menjamin hak asasi manusia tetapi pada kenyataannya kepolisian seringkali kehilangan kendali sehingga terjadilah pelanggaran hak asasi manusia di Polres kabupaten kepulauan meranti yakni penganiayaan kepada tersangka sehingga menyebabkan kematian. permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini pertama, bagaimanakah efektivitas peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara republik Indonesia kedua, apa faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara republik Indonesia.

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Polres kabupaten kepulauan meranti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara republik Indonesia dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, adapun populasinya adalah, seluruh anggota kepolisian dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang berdomisili di selat panjang dan sampelnya 30 orang dari 50 populasi. Penelitian ini menggunakan metode *purposive smpling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan skunder. Alat pengumpulan data adalah observasi, wawancara, angket dan studi pustaka.

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan efektivitas peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara republik Indonesia pada kepolisian Polres kabupaten kepulauan meranti masih kurang efektif dikarenakan kurangnya pengetahuan anggota Polres terhadap suatu peraturan yang berlaku dan masih banyak faktor-faktor penghambat diantaranya, minimnya dilakukan sosialisasi, kurangnya kesadaran anggota kepolisian Polres kabupaten kepulauan meranti untuk mengetahui suatu aturan dan kurangnya pengawasan dari Kapolri pada setiap provinsi dan kabupaten kota.